

Pencapaian SDGs Pada Kawasan Ekowisata (Studi Kasus: Situ Gunung Kabupaten Sukabumi)

Iqbal Abdul Muqsith¹, Rina Mardiana², Arya Hadi Dharmawan³

¹ Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University; email: iqbalmuqsith@gmail.com

² Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University; email: rmardiana@apps.ipb.ac.id

³ Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University; email: aryahadidharmawan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis keberlanjutan ekowisata di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Panggrango (TNGGP), berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Pengembangan ekowisata memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Gede Panggrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif numerik yakni *analytical hierarchy process* (AHP). Merupakan metode kualitatif bersifat numerik dari Thomas L Saati. Metode AHP membandingkan kriteria dengan kriteria yang kemudian akan menghasilkan prioritas utama. Hasil Penelitian menunjukkan peran masing-masing aktor memiliki kepentingan dan pandangan masing-masing terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGs). Hasil AHP menunjukkan bahwa masyarakat desa lebih berorientasi kepada ekonomi dalam memandang SDGs. Kurangnya kolaborasi antara pengelola, masyarakat lokal, dan swasta menjadi permasalahan ekowisata Situ Gunung. Sementara itu hasil AHP terkait prioritas aktor menunjukkan, kriteria ekonomi menjadi prioritas utama dengan skor 0.492, kriteria sosial 0.384, tata kelola 0,331 dan kriteria lingkungan 0.169. Sedangkan skor untuk kriteria alternatif memiliki hasil yakni; kerja sama stakeholders kolaboratif (0.483), mengurangi kemiskinan (0.439), infrastruktur (0.365), tata kelola yang baik (0,184), pengembangan UMKM (0.165) dan kesadaran lingkungan (0.103). Hasil tersebut membuktikan bahwa, pencapaian SDGs di bidang lingkungan masih sangat lemah dan tidak menjadi prioritas para aktor pelaku ekowisata Situ Gunung.

Kata kunci: Keberlanjutan, Ekowisata, SDGs, Analisis aktor, Analisis Stakeholders

ABSTRAK

This study emphasizes sustainability in the ecotourism context. Several aspects are needed to develop ecotourism such as social, economic, and environmental. Ecotourism is believed to be a useful tool in eradicating poverty if not all but in most parts of the world including Indonesia. The objective of this study is to enhance Ecotourism in Taman Nasional Gunung-Gede Panggrango (TNGGP). The researcher use descriptive qualitative method and analytical hierarchy process (AHP) as a numeric qualitative method from Thomas L Saati. The study found that each actor or stakeholders have different interest and views toward SDGs. The village community tends to orient on an economic aspect; The less collaborative action among managers, the village community, and private parties became the major problem of ecotourism in Situ gunung. Using AHP shows that Economy criteria as the main priority with a score of (0.492), social criteria are (0.384), Governance (0,331) environment criteria (0.169), While the scores for the alternative criteria have the following results; cooperation stakeholders collaborative (0.483), poverty alleviation (0.439), Infrastructure (0.365), Good Governance (0,184), develop Small Medium Enterprises (SMEs) (0.165), and environment protection institution (0.103). These results are in line with conditions in the field which prove that achievements in the environmental field are still very weak and are not a priority for Situ Gunung ecotourism actors.

Keywords: Sustainability, Ecotourism, SDGs, Actor Analysis, Stakeholders Analysis

Citation: Muqsith, A. I., Mardiana, R., Dharmawan, A. (2023). Pencapaian SDGs pada Kawasan Ekowisata (Studi Kasus: Situ Gunung Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(4), 740-754, doi:10.14710/jil.21.4.740-754

1. PENDAHULUAN

Tren pengembangan ekowisata di tingkat nasional maupun global mengalami peningkatan. Saat ini, tren ekowisata yang sedang berkembang di dunia

adalah ekowisata yang berbasis alam. Dalam penelitian Kooijman et al, (2021), mengenai *Nature Based Solution* (NBS), ekowisata memberikan peran dalam memberikan solusi penyelamatan ekosistem

lokal. Solusi tersebut menggunakan tiga tipe, yakni: (1) Restorasi alam (2) Pengelolaan lingkungan (3) Menciptakan ekosistem baru. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), di Indonesia peningkatan ekonomi akibat ekowisata dari 13,139 miliar US\$ meningkat menjadi 16,426 miliar US\$ pada tahun 2018. Industri pariwisata menyumbang pemasukan APBN terbesar kedua di Indonesia. Pariwisata berkontribusi positif terhadap pertumbuhan pekerjaan regional dalam sektor akomodasi dan pangan (Kronenberg & Fuchs, 2021).

Salah satu ukuran keberhasilan ekowisata adalah dengan menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada penelitian Forje et al, (2021) di Kamerun, pembangunan berkelanjutan yang diterapkan di Taman Nasional Campo Ma'an (CMNP) Kamerun, menerapkan skema SDGs sebagai indikator keberhasilan pembangunan SDM. SDGs menjadi program lanjutan dari PBB yang diterapkan 2015-2030. SDGs merupakan kelanjutan dari program *millenium development goals* (MDGs) yang digagas tahun 2000 yang masih berfokus pada sosial-ekonomi. Sedangkan SDGs lebih menambahkan proporsi lingkungan pada perencanaannya (Elder & Olsen, 2019).

Penilaian dan skor SDGs didasarkan pada proyeksi tahun 2030, dari 17 target dan 241 indikator Bidarbakhtnia (2020). Salah satu pencapaian SDGs adalah berkurangnya kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan dan mencegah kerusakan lingkungan. Sejalan dengan penelitian Li et al, (2020), pada ekowisata di Cina yang menerapkan wisata alam rendah karbon. Ekowisata di Cina menyeimbangkan antara ekonomi dan ekosistem. Gagasan berbasis ekonomi rendah karbon menjadi solusi efektif untuk konflik tajam antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan emisi karbon yang tinggi.

Wisata berbasis alam juga ditunjang oleh sinergisitas stakeholder. Menurut penelitian Shafieisabet & Haratifard (2020), kolaborasi pemangku ekowisata dapat menumbuhkan *profit* dan memberikan matapencaharian (livelihood) bagi masyarakat lokal. Sinergisitas pengelola dengan masyarakat lokal menjadi hal yang penting. Dalam penelitian Kry et al, (2020), efektifitas dan inovasi ekowisata telah dilakukan dalam kasus wisata di Thailand dengan menerapkan teknologi berbasis komunitas, *community-based ecotourism* (CBET).

Penerapan wisata tersebut mampu melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan wisatanya. Penerapan wisata berbasis komunitas di pedesaan juga harus memperhatikan kesetaraan sosial-ekonomi. Dalam kasus penelitian Li et al, (2020) di China, masalah kesenjangan sosial menjadi permasalahan utama di pedesaan, jika tidak dituntaskan masalah lain bisa terus mengakar, seperti masalah urbanisasi masyarakat desa ke kota. Pada kasus ekowisata di Indonesia dalam penelitian Nurhayati et al, (2019), berkembangnya ekowisata bahari di Pangandaran berpotensi menimbulkan

kerusakan alam, terutama kerusakan laut, seperti rusaknya terumbu karang akibat kurang pengawasan dan pengelolaan. Begitu juga penelitian Sukamantri et al (2021), penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di pedesaan harus ditunjang oleh tata kelola yang baik dari keberlanjutan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pentingnya tata kelola atau *governance* dalam upaya pengelolaan wisata alam perlu melibatkan tiga *stakeholders*, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat di segala bidang, baik bidang politik, sosial, budaya, maupun administrasi. Bentuk tata kelola berkelanjutan perlu diterapkan pada tiga *stakeholders* tersebut. Akibat kurang efektifitas peran *stakeholders* dan tata kelola yang baik dapat menyebabkan pemanfaatan potensi desa menjadi kurang optimal.

Sejalan dengan penelitian Wondirad et al, (2020) di Ethiopia Selatan, menunjukkan bahwa dengan buruknya relasi dan kerjasama antara pengelola, swasta, dan masyarakat lokal pada kawasan wisata dapat mempercepat degradasi sumber daya alam. Dalam konteks masyarakat pedesaan, pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat lokal sangat diperlukan agar masyarakat tergerak untuk mau membangun desa dan mengembangkan ekowisata. Salah satu potensi desa di kawasan Situ Gunung adalah hasil pengolahan pertanian dan UMKM. Pemanfaatan potensi desa harus dikelola oleh sumber daya manusia yang baik, agar hasil yang didapatkan menjadi maksimal dalam menyejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan mengenai permasalahan stakeholder, tata kelola, dan ekowisata, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pencapaian SDGs manakah yang diprioritaskan dalam pembangunan ekowisata Situ Gunung. Selain itu, tujuan penelitian ini sekaligus untuk menganalisis implikasi tata kelola yang diperlukan diperlukan untuk mencapai derajat keberlanjutan kawasan ekowisata Situ Gunung

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Desember 2021 sampai Desember 2022. Tempat penelitian terletak di kawasan ekowisata Situ Gunung dan sekitarnya yang berada di Desa Gede Panggrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif digunakan untuk menggali data dengan mendeskripsikan dan mendalami dari realitas sosial yang ada di lapangan Neuman (2013). Dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yaitu metode kualitatif numerik. Metode ini digunakan untuk membuat masalah/indikator yang kompleks menjadi terstruktur (Marsono, 2020).

Metode AHP digunakan dalam pengambilan keputusan yang menjadi prioritas dengan membandingkan dan mengukur berdasarkan konsep

yang telah ditentukan. Menurut Saaty (1994) dalam metode AHP peneliti harus membuat struktur hirarki terlebih dahulu untuk menggambarkan permasalahan. Struktur AHP disusun berdasarkan kriteria yang diambil dari indikator. Sebuah indikator dapat ditentukan dengan menyesuaikan permasalahan di lapangan, lalu kriteria tersebut dibandingkan satu sama lain.

Dalam mengumpulkan data penelitian, dibagi menjadi dua tahap yakni primer dan sekunder. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner AHP. Tahapan pengumpulan data primer yakni: wawancara, pengisian AHP, observasi lapangan, dan dokumentasi lapangan.

Menurut Sarwono (2006) observasi merupakan pencatatan dan pengamatan secara runtut dan sistematis yang akan diteliti, seperti objek dan kejadian. Pada tahap ini, peneliti mengobservasi lapangan dengan mengklasifikasi indikator SDGs, apa yang akan diukur dan dinilai pada AHP. Sedangkan data sekunder yang didapat dari hasil studi pustaka yang sesuai dengan penelitian ini.

Dalam metode analisis data yang menganalisis hasil wawancara dan menganalisis perhitungan AHP. Data yang telah didapat dari hasil wawancara dan penilaian responden kemudian dianalisis dan disintesis dengan temuan hasil wawancara. Data tersebut kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipilih. Penilaian AHP yang telah dikumpulkan, kemudian diolah menggunakan rumus AHP dengan menggunakan *microsoft excel* untuk perhitungan data AHP. Perhitungan menggunakan *microsoft excel* adalah untuk menghitung nilai rata-rata tiap aktor, nilai eigen vektor, dan mendapat bobot prioritas global dalam AHP. Dalam perhitungan AHP, setidaknya terdapat enam tahapan sebagai berikut:

Tahap *pertama*, prinsip *decomposition*. Prinsip ini mendeskripsikan suatu permasalahan yang ada dan menjelaskan secara hirarkis dengan memecah persoalan tersebut menjadi elemen-elemen yang terpisah. Bentuk struktur *decomposition* yakni:

- (1) Tingkat pertama: Tujuan keputusan (Goal)
- (2) Tingkat kedua: Kriteria – kriteria
- (3) Tingkat ketiga: Alternatif – alternatif

Tahap *Kedua*, prinsip penilaian komparasi (*comparative judgement*). Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks perbandingan berpasangan (Pairwise Comparasion).

Tahap *Ketiga* adalah menentukan prioritas (*Synthesis of Priority*). Sintesis prioritas ini didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas kriteria.

Tahap *keempat* dalam metode AHP adalah menentukan konsistensi dari penilaian berpasangan tersebut, lalu mengevaluasinya dengan menghitung *consistency ratio* (CR). Jika nilai CR lebih kecil atau sama dengan 0,1 maka hasil penilaian tersebut dikatakan konsisten. CR didapat dari *consistency index* yang dilambangkan CI dibagi *random consistency index* yang dilambangkan oleh RI (Sugiono, 2018).

Tahap *kelima* membuat matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dan bobot prioritas (eigenvektor) antar kriteria dan alternatif.

Tahap *keenam* membuat prioritas global. Perhitungan ini dengan mengalikan bobot tiap alternatif dengan bobot kriteria, hasilnya merupakan tingkat bobot prioritas dari masing-masing alternatif.

Pemilihan dan ukuran indikator diambil dari tujuh belas SDGs. Dari tujuh belas SDGs tersebut kemudian difokuskan menjadi lima SDGs. Pemilihan lima SDGs didasarkan atas permasalahan yang muncul di lapangan, yaitu kemiskinan, pengelolaan sampah, kerjasama multipihak, dan pengembangan UMKM. Pengisian kuesioner dan wawancara dilakukan oleh para aktor yang telah dipilih dengan mengacu pada teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. Subjek dan objek penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti pemilihan informan tersebut atas dasar bisa menjawab kondisi lapangan, Sugiono (2018). Pada masing-masing informan tersebut adalah *stakeholders* ekowisata Situ Gunung yang dapat menjawab kondisi lapangan, diambil dari pengelola, pemerintah lokal, swasta, dan masyarakat lokal.

Tabel 1. Indikator Perhitungan AHP

Klasifikasi	Tujuan	Indikator yang diukur oleh AHP
Sosial	Pencapaian Tanpa kemiskinan (SDGs No 1)	Mengurangi presentase kemiskinan
Ekonomi	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDGs No 8)	Pengembangan UMKM
	Industri, Inovasi dan Infrastruktur (SDGs No 9)	Infrastruktur yang baik
	Kemitraan (SDGs No 17)	Kerjasama Stakeholders
Lingkungan	Upaya penangan perubahan iklim (SDGs No 13)	Kesadaran lingkungan
Tata Kelola	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan Yang tangguh (SDGs No 16)	Tata kelola yang baik

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Peran Stakeholders Ekowisata Situ Gunung

Penerapan SDGs menjadi salah satu ukuran dari pembangunan berkelanjutan, proses penerapan ini diterapkan baik secara global dan nasional hingga ke tingkat desa. Pembangunan berkelanjutan menuntut keterpaduan pengelolaan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan sosial. Ketiganya menjadi pilar yang saling mendukung dan saling bergantung dengan pendekatan multi-stakeholder, yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Rout et al., 2020). Pembangunan berkelanjutan sangat memerlukan kolaborasi stakeholders. Peran masing-masing aktor dalam ekowisata menjadi kunci keberhasilan dan kesejahteraan suatu objek, dalam hal ini adalah ekowisata Situ Gunung berdampak luas di masyarakat dan keberlanjutan.

Tabel 2. Peran Stakeholders

No	Klasifikasi	Pemangku Kepentingan	Peran Stakeholders
1	Pemerintah	a) Resort Situ Gunung (TNGGP) b) Dispar Kab. Sukabumi c) Kecamatan Kadudampit d) Desa Gedepanggrano	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola, pengambil keputusan, mempromosikan, dan memanfaatkan • Memberikan izin dan promosi wisata • Melakukan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan UMKM • Melakukan pemberdayaan masyarakat dan mendistribusikan pertanahan lokal ke Situ Gunung melalui BUMdes
2	Swasta	e) PT Fontis Aquam Vivam	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi, membangun fasilitas wisata, dan menyediakan lapangan pekerjaan
3	Masyarakat lokal	f) Pedagang Wisata g) Ojek Wisata h) Pelaku UMKM i) Karang Taruna Desa j) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia bahan makanan dan menjual produk UMKM lokal • Jasa transportasi wisata • Menjual produk lokal • Sosialisasi kesadaran lingkungan • Promosi wisata dan memanfaatkan potensi SDA desa

Sumber: Data Pengolahan Hasil Penelitian

Menurut Ojong et al, (2013) sinergisitas antara ekowisata dan masyarakat sekitar *stakeholders* industri wisata diharuskan menyediakan lingkungan yang kondusif untuk mendorong peran masyarakat lokal dan memegang komitmen bahwa ekowisata harus menganut prinsip pariwisata berkelanjutan yang berdampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ekowisata bukan hanya mengacu pada keuntungan profit ekonomi. Menurut *The International Ecotourism Society* (2015) dalam Higham (2007). Ekowisata juga merupakan keikutsertaan dalam melestarikan lingkungan dan memiliki dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya dalam mengentaskan kemiskinan.

Ekowisata digerakkan oleh kehadiran actor-aktor yang berkolaborasi. Menurut Bumiaji (2021) kolaborasi multipihak adalah kolaborasi lebih dari dua pihak, contohnya kerjasama antara komunitas dan pemerintah. Sinergisitas para aktor diperlukan dalam membangun wisata berbasis kemasyarakatan. Pada ekowisata Situ gunung, kolaborasi bersifat multipihak, karena bekerjasama lebih dari dua pihak.

Pada tabel 2 menunjukkan klasifikasi pemangku kepentingan yang memiliki peran masing-masing. Dari hasil data lapangan menunjukkan kolaborasi antar aktor memiliki derajat yang berbeda, baik berdasarkan pengaruh ataupun kepentingan. dalam teori analisis stakeholder Ackermann & Eden (2011) mengkategorikan menjadi 4 klasifikasi dalam stakeholder berdasarkan derajat kepentingan dan pengaruh masing-masing aktor ke dalam dua jenis derajat yakni tinggi dan rendah.

High Interest	
(Subject)	(Key Player)
Low Influence (Crowd)	High Influence (Context Setters)
Low Interest	

Gambar 1 Kerangka Stakeholder (Ackermann & Eden, 2011)

Berikut 4 kelompok stakeholder:

1. *Key Players*
Kelompok *stakeholder* ini mempunyai kepentingan yang tinggi dan pengaruh yang

tinggi (high interest - high power) sekaligus mempunyai sumber daya.

2. *Subject*
Kelompok *stakeholder* ini mempunyai kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah (High Interest – Low Power)
3. *Context Setters*
Kelompok ini adalah *stakeholder* yang mempunyai kepentingan yang rendah tetapi memiliki derajat pengaruh yang besar (Low Interest – High Power).
4. *Crowd*
Kelompok ini adalah katagori *stakeholder* yang mempunyai derajat kepentingan yang rendah dan derajat pengaruh yang rendah pula (Low Interest – low Power).

High Interest

(Subject) Pedagang Ojek UMKM	(Key Player) TNGGP (resort situ gunung) Swasta (PT Fonntis)
Low Influence	High Infulence
(Crowd) Karang Taruna Pokdarwis	(Context Setters) Dinas Pariwisata Pemerintah Kecamatan Pemerintah Desa

Low Interest

Gambar 2 Analisis Klasifikasi Stakeholder

1. *Key Player*
Stakeholder yang masuk golongan ini diantaranya: *pertama* Resort Situ Gunung yang berada di bawah Taman Nasional Gunung Gedepanggrango (TNGGP) di bawah Kementrian Hutan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Pihak ini merupakan pengelola sumber daya alam di kawasan Situ Gunung. Resort Situ Gunung memiliki peran yang paling penting dan memiliki wewenang membuat keputusan dan program. (TNGGP) menjadi sangat kuat karena berada dibawah (KLHK) yang berada di skala nasional dan memiliki otoritas untuk mengelola Taman Nasional.

Kedua, pihak swasta. Pihak ini merupakan *stakeholders partnership* terdekat dari Situ Gunung. Perannya adalah menjalin kerjasama investasi dan penyediaan sarana dan prasarana di kawasan Situ

Gunung. Pihak swasta memiliki power besar karena mampu memberikan modal yang besar yang dibutuhkan oleh pihak Situ Gunung. Pihak swasta memiliki akses lebih dibandingkan pemerintah lokal. Hal ini disebabkan karena pihak swasta berwenang mengambil keuntungan dari adanya wisata alam ini, dalam hal ini adalah pembangunan jembatan gantung Situ Gunung yang saat ini menjadi *icon* penting di Situ Gunung, kemudian memanfaatkan sungai menjadi destinasi wahana baru.

Dari data lapangan menunjukkan peran ojek dan pedagang memiliki peran yang penting baik secara pengaruh terhadap keberlangsungan wisata dan kepentingan mereka sendiri. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa kedua pihak tersebut masuk ke dalam kategori subjek yang *power*nya rendah.

2. Subject

Kelompok stakeholder yang masuk ke dalam kategori ini yakni pedagang, ojek wisata, pemandu wisata, pekerja wisata, dan pelaku UMKM. Kelompok ini dibutuhkan oleh pihak Situ Gunung karena menyediakan kebutuhan pengunjung seperti pangan dan transportasi. Masyarakat lokal memiliki kepentingan yang besar di Situ Gunung, tetapi akses mereka tidak sekuat pemerintah lokal karena mereka jarang dilibatkan dalam program-program pengelola ekowisata. Selain itu sumber nafkah mereka di Situ Gunung juga rentan hilang terutama ketika masa PPKM, Situ Gunung mengalami penutupan selama 2 bulan selama periode Juli-Agustus 2021.

3. Context Setters

Stakeholder yang masuk ke dalam kategori *Context Setters* diantaranya: pemerintah local, baik dinas pariwisata, kepala desa, dan pihak kecamatan. Kelompok ini memiliki *power* dan otoritas, perbedaannya adalah *power* tidak membutuhkan legitimasi sedangkan otoritas membutuhkan legitimasi dan membutuhkan *power*. Pengaruh dinas pariwisata Sukabumi memiliki kepentingan yang rendah di Situ Gunung. Namun, dinas pariwisata memiliki otoritas dalam memberikan perizinan terhadap adanya pariwisata Situ Gunung, seperti izin pendirian fasilitas dan pembangunan. Pihak pemerintah lokal juga memiliki *power* dalam hal berkordinasi aspirasi masyarakat dan aktor penghubung dalam mensosialisasikan program terlebih dahulu ke pemerintah setempat sebelum ke masyarakat lokal. Pihak pemerintahan Desa Gedepanggrango memiliki peran mendistribusikan hasil pertanian warga ke Situ Gunung melalui BUMdes.

4. Crowd

Stakeholder yang masuk dalam kelompok ini diantaranya: Karang taruna, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang belum memiliki rancangan program bersama satu sama lain. Dua kelompok ini tidak mengantungkan langsung pendapatannya terhadap Situ Gunung, kelompok ini juga tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap Situ Gunung.

Peran karang taruna dan pokdarwis lebih besar dan terhubung dengan pemerintahan desa Gedepanggrango saja di bidang sosialisasi program, penertiban lahan parkir.

Dari data lapangan menunjukkan bahwa pokdarwis masuk ke dalam kategori *crowd*, Walaupun perannya dalam ekowisata dikategorikan memiliki kepentingan yang tinggi. Namun hasil data di lapangan menunjukkan bahwa kepentingan pokdarwis masih rendah terutama kelebagaannya masih belum kuat dan belum bersinergis dengan pengelola.

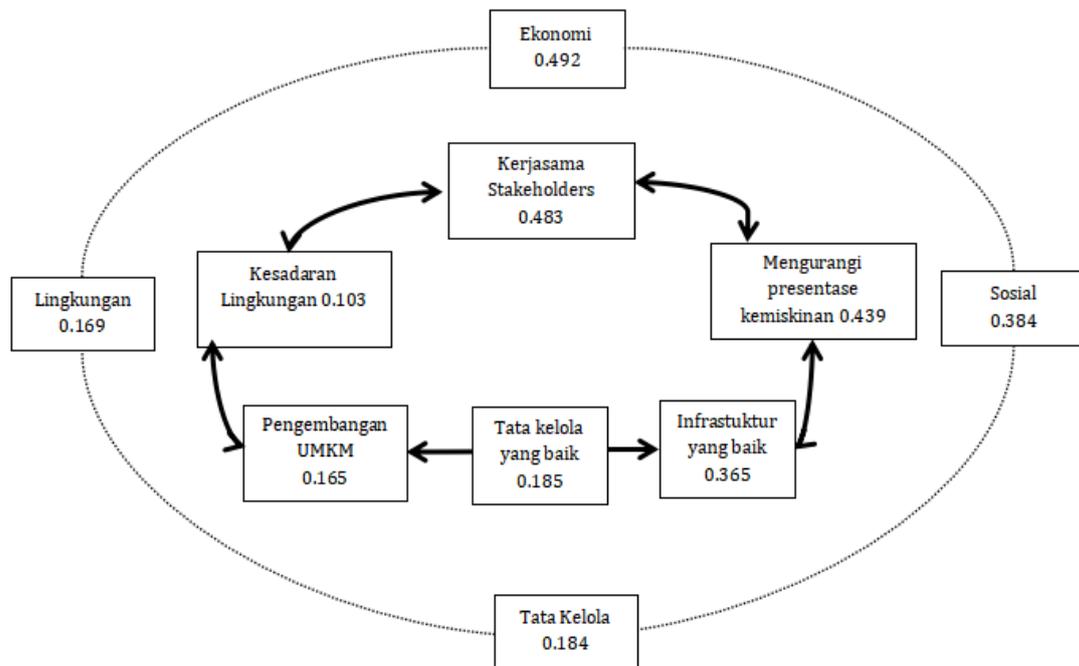
Dari empat klasifikasi stakeholder di atas, perbedaan kepentingan dan pengaruh masing-masing aktor menciptakan aktor-aktor yang *powerfull* dan *powerless* yang disebabkan oleh perbedaan pengetahuan, sumberdaya, akses, modal, dan jaringan sosial. Perbedaan *power* tersebut juga menimbulkan risiko terjadinya kesenjangan antar kelompok *stakeholder subject* dan *crowd*. Pihak *crowd* yang berasal dari karang taruna dan pokdarwis sebenarnya memiliki keinginan bekerja sama dengan pengelola dan swasta tetapi kolaborasi masih belum dilakukan.

3.2 Prioritas Sustainable Development Goals oleh Stakeholders Ekowisata Situ Gunung Berdasarkan AHP

Hasil Prioritas SDGs didapatkan dari penilaian AHP dan dilengkapi dengan hasil wawancara dari informan tersebut dari berbagai stakeholder. Pihak pemerintahan yang diwakili oleh dinas pariwisata Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Kadudampit, kepala resort Situ Gunung (TNGGP). Pihak swasta yang diwakili oleh PT Fontis Aquam Vivam. Pihak dari masyarakat lokal yang diwakili oleh pedagang wisata, ojek wisata, pelaku UMKM sekitar kawasan, dan karang taruna Desa. Berikut hasil struktur hirarki dan peringkat AHP dijelaskan pada gambar 3.

Dari gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara kriteria dan alternatif. Kriteria AHP ditunjukkan dengan garis putus-putus, terdapat empat kriteria yang saling berkaitan, 4 kriteria ini diambil dari 4 klasifikasi SDGs, yakni ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola. Sedangkan tanda panah dalam lingkaran kecil atau alternatif juga menunjukkan keterikatan satu sama lain. Penggunaan tanda panah digunakan untuk menunjukkan bahwa alternatif tersebut saling terhubung satu-sama lain.

Hasil kriteria AHP menunjukkan bahwa para aktor memprioritaskan kriteria ekonomi (0.492) sebagai prioritas utama. Sejalan dengan data lapangan mayoritas para aktor dalam hasil wawancara mengutamakan kesejahteraan ekonomi yakni pendapatan perbulan dan pekerjaan yang layak. Prioritas ini didominasi oleh aktor yakni: pelaku UMKM, pedagang, ojek wisata, dan Pihak Swasta. Aktor-aktor ini memiliki keterhubungan dan kepentingan yang tinggi dalam sektor ekonomi di kawasan ekowisata Situ Gunung.



Gambar 3 Prioritas AHP

Prioritas kriteria sosial bobot nilai sebesar (0.384). Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa pengelola dan pemerintahan lebih mengutamakan keberlanjutan sosial seperti: pendidikan, pemberdayaan, pelatihan, dan kerjasama. Prioritas ini didominasi oleh dinas pariwisata, pengelola Situ Gunung, pemerintahan kecamatan dan desa. Prioritas ketiga adalah tata kelola (0.184) di urutan ke-3 dari hasil wawancara menunjukkan bahwa tata kelola yang berjalan di Situ Gunung masih berfokus pada pihak pengelola dan swasta dibandingkan masyarakat local. Sedangkan para aktor memprioritaskan kriteria lingkungan pada urutan keempat sebesar (0.169). Aktor yang mengedepankan kriteria lingkungan adalah karang taruna desa.

Menurut data Desa Gedepanggrang (2022) pendidikan sarjana hanya diakses oleh 3,03 % penduduk, sedangkan mayoritas adalah lulusan SD sebesar 32,26%. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat desa menyebabkan SDM dan pengetahuan masyarakat rendah. Menurut Foucault, perbedaan tingkat pendidikan menciptakan relasi kuasa antar aktor, pihak dominan dan non dominan. Foucault mengemukakan konsep *"the power of knowledge"*. Pihak yang dominan memiliki pengetahuan yang tinggi, otomatis *power* dan kekuasaannya lebih tinggi. Sedangkan pihak yang memiliki pengetahuan rendah akan kalah secara *power*. Tingkat pendidikan yang berbeda menyebabkan kesenjangan sosial bagi masyarakat lokal (Abdul Mughis, 2013).

Dengan adanya pariwisata yang memiliki jumlah kunjungan besar, masyarakat pedesaan memiliki

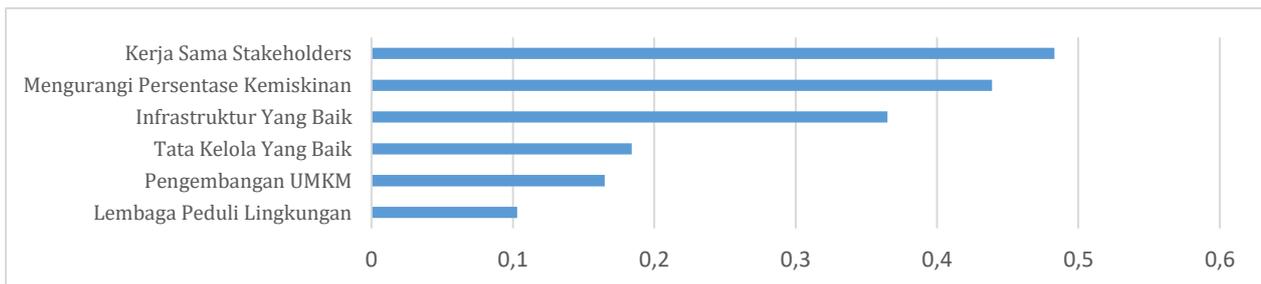
pandangan bahwa adanya pertumbuhan pengunjung dapat memberikan kesejahteraan ekonomi. Ekonomi dinilai primer dalam kehidupan karena kebutuhan sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan utama bagi manusia. Menurut data hasil wawancara dengan karang taruna desa dan pelaku UMKM, banyaknya antrian bantuan ketika masa Covid-19 menunjukkan indikasi masyarakat Desa Gedepanggrango masih rentan secara ekonomi dan masih belum sejahtera. Ekowisata Situ Gunung diharapkan memberikan kehidupan mereka lebih baik.

Setiap aktor memiliki kepentingan dan pemahaman SDGs, berdasarkan hasil observasi lapangan, menunjukkan masyarakat desa belum terlalu mengenal SDGS. Pengukuran SDGs di Desa Gedepanggrango baru dilakukan pada tahun 2022 oleh pihak desa. Hal tersebut menyebabkan masyarakat hanya mengetahui pembangunan yang bersifat langsung dan terlihat secara materil. Suatu keberlanjutan akan berlangsung jika semua aktor memanfaatkan potensinya dengan maksimal dan kolaborasi aktor terhubung satu sama lain. Pemerintah lokal harus berperan aktif dalam sosialisasi, pengelola harus memberikan kebijakan yang proporsional terhadap warga desa, sedangkan pihak swasta harus menyeimbangkan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengelola sebagai pemegang akses tertinggi perlu merealisasikan program yang berdampak positif kepada masyarakat.

Dari hasil AHP pada 4 kriteria dan 6 alternatif tersebut juga saling terhubung satu sama lain. Keterhubungan prioritas aktor tersebut akan dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Keterhubungan Hasil Prioritas AHP

Kategori	Indikator yang berkaitan	Hubungan dengan kategori	Hasil Pencapaian
Ekonomi	Mengurangi Presentase Kemiskinan	Sosial	Meningkatkan kesejahteraan penduduk desa
		Lingkungan	Memanfaatkan jasa lingkungan sebagai potensi pariwisata dan menghasilkan pekerjaan baru
	Pengembangan UMKM	Sosial	Memberdayakan perempuan desa
	Infrastruktur yang baik	Lingkungan	Memanfaatkan hasil pertanian desa
Sosial	Mengurangi Presentase Kemiskinan	Sosial	Mempermudah akses pengunjung
		Lingkungan	Menguatkan kohesivitas sosial antar aktor
	Kerjasama stakeholder	Lingkungan	Meningkatkan kerjasama dalam pencegahan kerusakan ekosistem di kawasan wisata
	Kesadaran lingkungan	Sosial	Berkurangnya penduduk miskin desa dengan adanya lapangan pekerjaan
Lingkungan	Kesadaran lingkungan	Ekonomi	Meningkatkan keuntungan ekonomi semua stakeholder
		Lingkungan	Membuat teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
	Infrastruktur yang baik	Ekonomi	Komersialisasi limbah menjadi produk UMKM
		Sosial	Mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat sampah pengunjung
Tata kelola	Tata Kelola yang baik	Sosial	Mengurangi presentasi kemiskinan dengan membuat pupuk kompos
		Ekonomi	Meningkatkan keuntungan ekonomi di sekitar kawasan wisata
	Lembaga Peduli Lingkungan	Lingkungan	Memfasilitasi mobilisasi penduduk local dan pengunjung ekowisata
		Sosial	Membuat peraturan dan kebijakan yang partisipatif dengan mengurangi persentase kemiskinan
Lembaga Peduli Lingkungan	Lembaga Peduli Lingkungan	Ekonomi	Membuat peraturan pembebasan biaya pajak bagi pedagang di kawasan Situ Gunung
		Lingkungan	Membuat aturan pemisahan sampah organik dan non organik serta kebijakan reboisasi



Gambar 4 Perhitungan Alternatif Berdasarkan Peringkat

Dari Tabel 3 menunjukkan keterkaitan satu-sama lain, yang dikaitkan oleh peneliti dari hasil data lapangan. Dalam suatu pembangunan SDGs, harus saling berkaitan satu sama lain, baik ekonomi dan sosial, ekonomi dan lingkungan, dan tata kelola. Dalam gambar 4 mendeskripsikan 6 alternatif berdasarkan urutan prioritas para aktor pada ekowisata Situ Gunung.

Berikut adalah hasil data prioritas alternatif dan disintesis dengan data hasil wawancara, data ini diurutkan berdasarkan peringkat AHP, maka hasilnya sebagai berikut;

3.2.1 Pencapaian SDGs Kemitraan untuk Indikator Kerjasama Stakeholders

Pencapaian SDGs berfokus terhadap keberlanjutan ekonomi. Dalam penelitian ini, indikator tercapainya SDGs kemitraan adalah kerjasama stakeholders dengan bobot prioritas 0.503 menjadikan prioritas tertinggi oleh mayoritas aktor. Ketercapaian SDGs kemitraan ditentukan oleh kerjasama masing-masing aktor yang terjalin satu sama lain, kerjasama tersebut memiliki program Bersama, baik pihak pengelola,

swasta, pemerintah, dan masyarakat lokal (Arnold, 2018).

Menurut pengelola TNGGP (2022), kemitraan antara pihak resort Situ Gunung dan pihak swasta dengan skema perjanjian izin usaha penyediaan wisata alam (IUPSWA), yakni perjanjian kerjasama antara TNGGP dan pihak swasta dengan pemodal Rp. 10.000.000 perhektar. Situ Gunung sendiri memiliki luas 102 hektar. Bentuk kerjasama pihak swasta adalah bidang sarana dan prasarana di dalam kawasan wisata.

Sedangkan kerjasama Situ Gunung dan pemerintah lokal masih kurang maksimal. Bentuk kerjasama baru berupa penempatan pedagang dan ojek di kawasan ekowisata. Kerjasama di bidang pemberdayaan masih belum dilakukan secara intensif oleh pengelola kepada masyarakat sekitar Situ Gunung. Peran masyarakat dalam stakeholders diidentifikasi ke dalam kategori *crowd* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah (Bryson, 2016). Hal tersebut menyebabkan lemahnya akses dan aspirasi terhadap pengelola. Kerjasama dengan masyarakat terutama UMKM

belum banyak difasilitasi oleh pihak TNGGP kerjasama antar pedagang dan UMKM juga belum begitu terjalin. Para pedagang banyak memasok oleh-oleh dari luar desa, mengakibatkan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

3.2.2 Pencapaian SDGs Tanpa Kemiskinan untuk Indikator Mengurangi Presentase Kemiskinan

Pencapaian SDGs berfokus terhadap keberlanjutan sosial dengan indikator “mengurangi presentasi kemiskinan”. Dari hasil perhitungan AHP didapatkan skor 0.466.

Dalam pencapaian SDGs no 1 Kategori miskin ekstrem menurut (BPS, 2018) adalah jika pendapatan dibawah 1,25 dolar/hari atau 37,5 dolar/bulan. kurs rupiah pada 15 Juni 2022 adalah 14.475 sehingga 1,25 dolar sama dengan sebesar Rp. 18.093/hari atau Rp 542.812/bulan. Jika kurang dari pendapatan ini maka individu tersebut dikatakan miskin. Adanya ekowisata Situ Gunung cukup meningkatkan perekonomian masyarakat, baik menjadi pedagang wisata, ojek wisata, pekerja di pihak swasta, dan pemandu wisata dengan penghasilan Rp. 1.500.000 hingga Rp. 4.000.000 perbulannya. Namun, pelaku UMKM desa memiliki pendapatan rata-rata Rp 500.000 perbulan dan menempatkannya dalam kondisi menengah bawah secara ekonomi.

Menurut Koehler (2016) kemiskinan dipahami sebagai kemiskinan ekonomi dan daya beli masyarakat yang rendah. Kemiskinan juga dilihat bagaimana kerjasama desa dengan masyarakat lokal dengan skema koperasi unit desa (KUD). Penelitian Hutauruk & Harto (2017) koperasi berperan dalam mengokohkan ekonomi rakyat, salah satu kegunaannya adalah berupa simpan-pinjam dalam menghadapi kerentanan. Menurut pemaparan kepala desa Gedepanggrango, koperasi di Desa Gedepanggrango masih belum dibentuk. Hal ini menyebabkan masyarakat desa Gedepanggrango di masa pandemi rentan secara ekonomi dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah kabupaten. Menurut pemaparan karang taruna, di masa pandemi tak sedikit masyarakat yang antre untuk menerima bantuan, hal ini menggambarkan banyak dari masyarakat yang belum sejahtera dan rentan secara ekonomi.

3.2.3 Pencapaian SDGs Industri, Inovasi dan Infrastruktur untuk indikator infrastruktur yang baik

Pencapaian SDGs ini berfokus terhadap keberlanjutan ekonomi. Prioritas para aktor menempatkan indikator “Infrastruktur yang baik”, dan menempatkan SDGs ini pada urutan ke tiga dengan skor 0.185. Dalam mengukur keberhasilan indikator ini adalah dengan melihat pembangunan sarana dan prasarana wisata. Menurut (Risandewi, 2017) Infrastruktur wisata yang baik ditunjang oleh fasilitas pendukung seperti sarana transportasi yang memadai dan sinergisitas transportasi lokal.

Tabel 4. Sarana dan Prasarana Situ Gunung

No	Infrastruktur	Jumlah Pelaku usaha (Orang)
1	Ojek Wisata	157
2	Warung Wisata	144
3	Perahu Wisata	37
4	Interpreter/Guide	26
5	Angkutan Lokal	47
6	Cafe dan Resto	4
7	Glamping	10

Sumber: (TNGGP, 2022)

Data hasil wawancara lapangan menunjukkan infrastuktur dan prasarana menuju Situ gunung sudah cukup lengkap, baik segi jalan dan sarana prasarananya. Namun, permasalahan terjadi di saat libur panjang tiba. Pihak Situ Gunung masih kekurangan lahan parkir dan bergantung pada lapangan warga sekitar, hal tersebut mengakibatkan penumpukan kendaraan.

Pembangunan infrastruktur, seperti sarana dan prasarana baik itu jembatan gantung, cafe dan resto di kawasan Situ Gunung harus melakukan penebangan hutan. Pihak swasta dan resort memaparkan pembangunan sudah memperhitungkan lingkungan agar tetap terjaga. Menurut pihak karang taruna, pembangunan sarana prasarana wisata juga bisa mempengaruhi kualitas air di desa karena limbah air dibuang ke sungai dari kawasan Situ gunung.

3.2.4 Pencapaian SDGs Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh untuk Indikator Tata Kelola Yang Baik

Pencapaian SDGs ini fokus terhadap pilar Tata Kelola dan hukum. Prioritas para aktor menempatkan indikator “Tata kelola yang baik”, dan menempatkan SDGs ini pada urutan ke-empat dengan skor 0.184. Mengukur keberhasilan indikator dilakukan dengan cara melihat bagaimana tata kelola dari negara, swasta, dan masyarakat berjalan dengan baik yang sesuai dengan prinsip ekowisata dan tujuan pembangunan berkelanjutan pilar ke-empat mengenai hukum dan tata kelola. Ukuran tersebut yakni tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hasil data lapangan menunjukkan bahwa tata kelola di pihak pemegang pengelolaan tertinggi, yakni TNGGP, pemanfaatan dan pengembangan ekowisata Situ Gunung menggunakan sistem zonasi dan “design tapak”. Melakukan pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona pemanfaatan dan zona rimba yang diperuntukan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam. Dalam pengelolaan ini, TNGGP juga berkolaborasi dengan pihak swasta dengan perjanjian selama 55 tahun dengan nama perjanjian IUPJWA.

Dalam pengelolaan tersebut, pihak swasta mampu memberikan modal kapital dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi, jasa transportasi, jasa paket wisata, dan lain sebagainya. Dengan tata kelola kerja sama antara TNGGP dan swasta sudah termasuk tata kelola yang kolaboratif. Di sisi lain, tata kelola perlu

mengedepankan prinsip dalam ekowisata, yakni partisipasi masyarakat. Di Situ Gunung sendiri konsultasi dan pertemuan dengan masyarakat dalam mendiskusikan program yang akan dilakukan Situ gunung kedepannya belum berkelanjutan. Masyarakat jarang dilibatkan dalam pengelolaan, hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan dan *power*. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat belum bisa vokal dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang ekowisata Situ Gunung.

Sedangkan bentuk evaluasi dan sosialisasi oleh pihak pemerintah lokal, seperti pemerintahan desa dan kecamatan, masih belum bisa menjembatani masyarakat lokal terhadap pihak pengelola TNGGP dan swasta. Jika dilihat dari keadaan tersebut, tata kelola yang partisipatif belum tercapai dan perlu mengadakan perbaikan, terutama efektifitas tata kelola tersebut bisa bersifat *bottom up* aturan aturan bisa disesuaikan dengan konteks masyarakat desa.

3.2.5 Pencapaian SDGs Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi untuk Indikator Pengembangan UMKM

SDGs ini merupakan SDGs no. 8 yang berfokus pada keberlanjutan ekonomi masyarakat. Peneliti mengambil indikator “Pengembangan UMKM” dalam mengukur penghitungan prioritas AHP. Hasil menunjukkan bobot skor adalah 0.166 dan berada pada peringkat ke 4.

Pengembangan UMKM di desa menjadi sangat penting dalam penelitian (Bagus et al., 2018) pada ekowisata Dieng, pengembangan UMKM harus ditunjang oleh tata kelola yang baik. Pentingnya dukungan dan sinergisitas dari pihak pengelola, swasta, dan pemerintah lokal sangat penting untuk mengembangkan potensi desa khususnya UMKM. Sejalan dari penelitian tersebut hasil wawancara menunjukkan bahwa pengembangan UMKM di Desa Gedepanggrango masih kurang di dukung terutama di bidang fasilitas pendukung, pemodalan dari pemerintah lokal. Hal tersebut menjadi penyebab UMKM masih belum berkembang. Faktor lain adalah kurangnya snergisitas dukungan sesama pedanggang di kawasan yang memasok barang dagangan dari luar Kabupaten Sukabumi.

Salah satu UMKM lokal adalah “Pujasera Binangkit”, UMKM ini menghimpun 10 UMKM skala rumah tangga yang dikerjakan oleh ibu-ibu berstatus janda di kampung mereka. Pujasera menghimpun UMKM, lalu menjadikan *brand* dari hasil olahan pertanian hortikultura petani lokal.

Hasil olahan ini dibuat di rumah masing-masing dan ada juga yang kolektif kemudian dijual di sekertariat pujasera. Anggota himpunan ini berjumlah 10 hingga 25 orang dengan memproduksi 10-15 olahan. Produk UMKM ini kemudian dijual di kantor sekertariat dan sebagian dititipkan untuk dijual di Situ Gunung. Pendapatan perorang dalam UMKM ini tidak lebih dari Rp 500.000/bulan. Pendapatan ini berada di bawah profesi lain di desa Gedepanggrango seperti pedagang, ojek, dan pekerja di Situ Gunung. Dengan pendapatan tersebut

menyebabkan pelaku UMKM di desa Gedepanggrango berada dalam garis kemiskinan.

Tabel 5. Daftar Rata-Rata Pendapatan/bulan Menurut Matapencaharian

Matapencaharian	Rata-rata pendapatan/bulan
Pedagang	Rp. 4.000.000
Ojek wisata	Rp. 2.000.000
Pekerja swasta	Rp. 3.125.000
Angkutan lokal	Rp. 4.000.000
Pemandu wisata	Rp. 3.000.000
Perahu Wisata	Rp. 2.000.000
Pelaku UMKM	Rp. 500.000

Sumber: Survei Lapangan (2022)

Dari data di atas menunjukkan, pendapatan pelaku UMKM masih jauh di bawahatapencaharian lain yang berada di kawasan Situ Gunung. Hal ini disebabkan pelaku UMKM belum mendapatkan fasilitas yang memadai di Kawasan ekowisata dan mereka hanya menitipkan barangnya ke pedagang. Faktor lain adalah produk dari luar desa lebih banyak dijual oleh pedagang karena di Situ Gunung dianggap lebih menguntungkan.

3.2.6. Pencapaian SDGs Upaya Penanganan Perubahan Iklim untuk Indikator Kesadaran Lingkungan

SDGs ini merupakan fokus dari pembangunan berkelanjutan di bidang lingkungan. Peneliti mengambil indikator “Lembaga Peduli Lingkungan”. Dari hasil prioritas para aktor Alternatif ini mendapatkan skor 0.101 dalam perhitungan AHP, dan berada pada urutan terakhir.

Dari data wawancara dan observasi di kawasan wisata menunjukkan bahwa, permasalahan sampah menjadi masalah di Situ Gunung. Kunjungan wisatawan yang banyak mengakibatkan volume sampah ikut banyak, terutama di kawasan danau. Kebiasaan pengunjung membuang sampah sembarangan masih perlu diberi pengarahannya, karena dapat merusak keindahan alam dan dapat mengotori alam. Selain itu, kebiasaan membuang sampah di sungai pada masyarakat sekitar dikhawatirkan memicu banjir di kawasan hilir dari sungai.

Menurut pemaparan karang taruna Desa Gedepanggrango, dampak lain banyaknya jumlah pengunjung di Desa Gede panggrango adalah habitat satwa, seperti lutung, merasa tidak nyaman. Dulu di daerah desa masih banyak lutung yang berkeliaran, tetapi setelah banyaknya pengunjung, lutung jarang menampakkan diri lagi. Karang taruna memaparkan bahwa terdapat LSM pecinta lingkungan desa yakni “Dampal Jurig” LSM ini berfokus pada upaya reboisasi desa. Tetapi LSM ini masih kurang mendapat dukungan dari pemerintah lokal. Penguatan lembaga perduli lingkungan pada ekowisata di pedesaan sangat diperlukan. Menurut Cloutier & Pfeiffer (2015) kerusakan ini dapat diatasi dengan membentuk lembaga perduli lingkungan yang dapat meningkatkan ikatan sosial antar masyarakat.

Lembaga peduli lingkungan di masyarakat menjadi faktor keberhasilan pencapaian SDGs.

3.2.7 Analisis Kritis Terhadap Pencapaian Ekowisata Situ Gunung

Dari hasil pencapaian SDGs di kawasan ekowisata Situ Gunung menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang tidak tercapai dalam pengembangan ekowisata di kawasan. Pertama, ekowisata Situ Gunung dalam hal investasi masih menunjukkan bahwa orientasi ekonomi masih mendominasi. Hal ini dibuktikan dengan pihak swasta yang memfokuskan jumlah kunjungan menjadi faktor utama dalam indikator keberhasilan ekowisata. Nilai SDGs ekonomi yang tinggi menunjukkan prioritas mayoritas aktor, baik swasta dan masyarakat lokal yang menginginkan keberlanjutan ekonomi menjadi hal yang utama.

Kedua, dalam pencapaian SDGs dalam bidang sosial perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal kerjasama stakeholder. Pengelola dan swasta harus lebih bersinergis dengan semua pihak. Namun, data di lapangan menunjukkan kerjasama dalam membuat kebijakan dan program di kawasan masih belum terjadi, di antaranya antara pengelola dengan karang taruna, pokdarwis, dan UMKM. Investasi di bidang ekonomi masih belum sepenuhnya terasa di sektor kerjasama kepada masyarakat lokal.

Ketiga, kritik terhadap ekologi dalam pencapaian SDGs. Nilai-nilai prioritas para aktor memiliki nilai yang rendah tentang lingkungan. Sesuai dengan data di lapangan, keberadaan ekowisata masih belum berimbang dengan program dan kebijakan dari swasta, pemerintah desa. Pengelolaan sampah pengunjung belum menjadi peluang ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal di sana. Kemudian, banyaknya pengunjung juga dapat merusak air di kawasan danau karena jumlah volume sampah yang banyak di kawasan danau. Keseimbangan antara keberlanjutan sosial, ekonomi dan lingkungan perlu di seimbangkan dengan beberapa aksi yakni kesadaran dari semua aktor yang terlibat.

3.3. Pemahaman Masing- masing Aktor tentang SDGs

Tabel 6. Pemahaman SDGs Stakeholder

No	Pemahaman Mengenai SDGs	Pemerintah	Swasta	Masyarakat
1	Peningkatan pendapatan	√	√	√
2	Pemberdayaan masyarakat	√	X	X
3	Pembangunan infrastruktur	√	√	√
4	Promosi ekowisata	√	√	X
5	Pengelolaan sampah	X	X	√
6	Pemanfaatan potensi pertanian desa	X	X	√
7	Kesadaran lingkungan	√	X	√

Pemahaman masing-masing aktor mengenai SDGs di Situ Gunung memiliki perbedaan, baik itu pemerintah dan pengelola, swasta, dan masyarakat lokal. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pemahaman pencapaian SDGs sama –sama dipahami oleh semua stakeholder dengan cara peningkatan pendapatan dan pembangunan infrastruktur sebagai pemahaman yang diharapkan oleh semua aktor. Sedangkan pemberdayaan masyarakat sebagai capaian SDGs hanya dipahami oleh pemerintah. Ketidakseragaman ini yang menimbulkan pencapaian SDGs di kawasan ekowisata tidak maksimal.

Bagi pengelola SDGs dipahami sebagai wacana perencanaan kerja mereka dalam pengembangan wisata Situ Gunung. Dari data lapangan menunjukkan pihak pengelola kuat di bidang sosial terutama dalam kerjasama stakeholder, pelatihan dan penelitian. Menurut Ngoyo (2015) pembangunan SDGs sering dipahami dengan pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan berkelanjutan dan kualitas lingkungan yang masih banyak diabaikan dalam pengukuran konvensional. Sejalan dengan penelitian tersebut, data di lapangan menunjukkan, pihak swasta memandang SDGs dengan lebih praktis dan lebih oportunistik.

Pihak swasta memaparkan, dengan adanya wisata Situ Gunung memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan dan pengentasan pengangguran penduduk sekitar. Namun, dalam bidang lingkungan, seperti pengolahan sampah daur ulang, masih belum profesional dilakukan. Dalam data lapangan dan hasil observasi, peneliti dari sudut pandang swasta yang lebih kearah ekonomi. Hal ini ditunjukkan pembangunan lebih masif dalam fasilitas dan infrastruktur penunjang, yang baik untuk menarik minat pengunjung.

Penelitian Jusman (2016) menunjukkan bahwa pemerintah lokal memahami SDGs masih bersifat birokratis. Pemaknaan SDGs bagi pihak dinas pariwisata, pemerintah desa dan kecamatan di kawasan Situ Gunung dipahami sebagai *rules* dan *goals* yang harus dicapai. Pemerintah desa, dan kecamatan, penerapan SDGs diimplementasikan dengan pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi desa, daur ulang sampah, pengembangan pertanian desa. Sedangkan pengukuran SDGs di desa Gedepanggrango baru diukur di akhir tahun 2021.

Bagi dinas pariwisata, pembangunan pencapaian SDGs disesuaikan dengan masyarakat lokal. Dengan menerapkan skema "*bottom-up*", pihak dinas pariwisata mengedukasi, bahwa masyarakat tidak boleh "*money oriented*" atau berfokus pada pembangunan materil saja. SDGs dipahami oleh masyarakat lokal, baik itu pedagang, ojek, karang taruna dan Pokdarwis dengan berbeda-beda. Pedagang dan ojek kawasan tidak begitu paham dengan konsep SDGs yang mereka tahu adalah program pemerintah dengan istilah "proyek". SDGs dipahami sebagai pembangunan infrastruktur" atau bantuan fasilitas dari pemerintah. Bagi mereka dengan mendapatkan pendapatan setiap bulannya sudah lebih dari cukup. Tolak ukur kesuksesan

ekowisata dipahami dengan banyaknya jumlah kunjungan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Pemahaman pembangunan ekonomi menjadi sangat kuat dalam pikiran mereka, karena kerentanan ekonomi kemiskinan dan kesenjangan adalah sesuatu yang paling berat bagi mereka.

Di masa pandemi terutama di 2020-2021, pendapatan masyarakat sekitar berkurang drastis. Situ Gunung tutup selama Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) Maret 2020-Agustus 2020 dan pada saat masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Juli 2021-Agustus 2021. Dua fase terberat ini dirasakan seluruh elemen masyarakat di kawasan dan di luar kawasan Situ Gunung. Resiliensi mereka adalah dengan mengandalkan bantuan pemerintah dan tabungan pribadi.

Sedangkan menurut pelaku UMKM, SDGs dipahami sebagai pembangunan yang mampu menyejahterakan masyarakat di bidang ekonomi dan sosial. Menurut pihak UMKM pihak pengelola dan pemerintah lokal belum banyak melakukan pemberdayaan dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Kolaborasi antara pemerintah lokal dan swasta dinilai masih kurang. Warga desa yang sebenarnya memiliki potensi pertanian masih banyak yang belum sejahtera. Pihak UMKM sendiri banyak memasarkan dagangannya secara pribadi di kantor sekertariat UMKM. Salah satu alasannya karena produk dagangannya kalah saing dari produk yang diambil dari luar desa, seperti kerajinan berbahan gelang yang dijual para pedagang.

Pandangan lain tentang SDGs hadir dari pihak karang taruna dan kelompok sadar wisata "Pokdarwis" kelompok ini merupakan kelompok pemuda yang berkerjasama dengan pihak desa. Menurut pokdarwis, adanya SDGs pada ekowisata Situ Gunung belum sepenuhnya dimanifestasikan oleh pihak Situ Gunung, swasta, dan pemerintah lokal. Ditambah lagi pemahaman masyarakat desa menganggap pembangunan itu harus bersifat fisik.

Pemahaman SDGs dimanifestasikan oleh karang taruna di bidang lingkungan. Salah satu contohnya adalah mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai dan mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk organik. Hal ini sudah masyarakat lakukan dan taati bersama, pupuk organik digunakan untuk menyuburkan pertanian di kawasan Desa Gedepanggarango.

4. Implikasi Perbaikan Tata Kelola Untuk Keberlanjutan Ekowisata Situ Gunung

Implikasi perbaikan tata kelola pariwisata meliputi perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi. Proses ini tidak akan berjalan efektif bilamana hanya mengedepankan pelaksanaan yang bersifat *top down* terlebih parsial. Diperlukan kerja sama yang berkualitas. Sudut pandang kolaborasi dinilai lebih sesuai dalam melihat pembangunan pariwisata dari sisi tata kelola dan manajemen, khususnya pariwisata yang berjenis ecotourism.

Penelitian Eshun & Tettey (2014) tentang kajian terkait prospek dan tantangan pariwisata di Ghana, kurangnya dukungan pemerintah dan lemahnya stakeholders kunci menyebabkan wisata domestik di sana menjadi sepi pengunjung. Hal ini mengisyaratkan bahwa konektivitas pemerintah dan pengelola perlu di topang oleh tata kelola yang baik. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pemerintah pada era reformasi birokrasi, karena dengan hal tersebut dapat membangun harmonisasi dan sinergi cara kerja yang harus dilakukan serta membentuk suatu hubungan yang berkesinambungan (Silayar, 2021).

Menurut Ansell dan Gash (2007) pemerintahan kolaborasi (*collaborative governance*) adalah cara sebuah pemerintahan yang mengatur suatu atau lebih lembaga-lembaga publik pemangku kepentingan non pemerintahan dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Pendapat tersebut didukung dengan Emerson (2011) yang menyatakan pemerintahan kolaborasi (*collaborative governance*) sebagai proses dan struktur pengambilan keputusan kebijakan publik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja.

4.1 Tata Kelola Negara

Negara sebagai pembuat kebijakan harus mengupayakan aspek keberlanjutan pada hasil sumber daya alam bukan membuat kebijakan-kebijakan yang justru mengeksploitasi sumber daya. Negara harus sinergis seperti penerapan dari kebijakan bersifat pusat hingga daerah. Kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi alam dan sosiologis masyarakatnya. Penerapan kebijakan langsung dari pemerintah mengakibatkan program-program tidak efisien sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Dalam tata kelola negara perlu disoroti apakah negara memberikan mekanisme imbal jasa pada kebijakan pemerintah dalam membangun pariwisata di daerah.

Tata kelola negara dalam konteks pembangunan berkelanjutan, mengacu kepada peran pemerintah daerah dan lokal di kawasan ekowisata. Tata kelola tidak tersentralisasi, aturan dan pemerintahan tersebut dianggap terlalu kaku dan tidak bisa merepresentasikan *problem* dalam lingkup desa. Pemerintah justru harus desentralisasi dan menyelesaikan masalah seperti diversifikasi masyarakat dari *bottom-up* atau diartikan pemetaan pembangunan harus berakar dari permasalahan masyarakat lokal. Hal ini karena setiap masyarakat dan daerah memiliki perbedaan *problem issue*. Pada konteks Negara Indonesia yang bersifat heterogen, yang melatarbelakangi dibuatnya deregulasi desentralisasi maka diberlakukan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Tujuannya agar tidak ada proses pembangunan yang sentralistik

sehingga masyarakat daerah khususnya perdesaan dapat merasakan segala upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. (Hasanah, 2019).

Hasil data lapangan menunjukkan bahwa tata kelola di pihak pemegang pengelolaan tertinggi yakni TNGGP pemanfaatan dan pengembangan ekowisata Situ Gunung menggunakan sistem zonasi dan “design tapak” yakni dengan melakukan pembagian ruang pengelolaan pariwisata alam di zona pemanfaatan dan zona rimba yang diperuntukan bagi ruang publik dan ruang usaha penyediaan jasa/sarana pariwisata alam. dalam pengelolaan ini TNGGP juga bermitra dengan pihak swasta dengan perjanjian selama 55 tahun dengan nama perjanjian IUPJWA.

Dalam konteks wisata Situ Gunung, peran dan relasi kerja sama antara pemerintah daerah, dinas pariwisata Kabupaten Sukabumi, pengelola, dan pemerintah lokal harus sinergis. Bentuk kerjasama, dinas pariwisata mengikuti peraturan bupati dalam bidang kerja sama dan daya tarik. Dinas pariwisata menjadi aktor yang menjalankan amanat pemerintah, baik dana APBD dan APBN untuk disalurkan dalam pembangunan pariwisata di Sukabumi yang akan mengatur dana yang masuk dan keluar. Mekanisme kerja sama lain adalah dengan memberikan bantuan berupa pembangunan fasilitas penunjang pariwisata diserahkan kepada pihak desa.

Tata kelola negara berkelanjutan dalam membuat sebuah aturan dan kebijakan harus menjangkau semua kelas sesuai dengan kearifan lokal. Pemerintah harus berperan aktif dan sesuai dengan kebutuhan dan tetap menjaga ekosistem yang ada. Di Situ Gunung belum sepenuhnya optimal, pihak pengelola dan dinas pariwisata dalam membuat deregulasi masih belum terasa hingga masyarakat. Biaya finansial untuk mencapai tata kelola keberlanjutan sangat besar, dalam konteks Situ Gunung, kerja sama pemerintah dengan pihak swasta juga belum berjalan dengan baik.

Kekuatan setiap aktor yang berbeda-beda dipengaruhi pandangan filosofis mereka tentang SDGs dan kepentingan dari masing-masing aktor. Dalam kasus Situ Gunung pihak TNGGP yang di bawah KLHK memiliki agenda *sustainability* yang seimbang dari bidang ekonomi, sosial dan lingkungan. Ekowisata harus didasarkan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan dan ekosistem. Kekuatan dari Situ Gunung juga mempengaruhi pihak swasta dalam hal kebijakan. Perjanjian antara TNGGP dan swasta dalam investasi modal di Situ Gunung tetap harus sejalan peraturan yang diterapkan TNGGP terutama pembangunan berupa fasilitas penunjang yang harus menebang pohon.

4.2 Tata Kelola Swasta

Tata kelola swasta dalam konteks ekowisata harus melihat sisi keberlanjutan, bukan melihat jumlah kunjungan atau profit saja. Di Situ Gunung, permasalahan sampah berserakan, khususnya sekitar danau perlu diperhatikan dengan memberikan sanksi dan pemantauan secara intensif kepada pengunjung. Selain itu, spot-spot khusus harus tetap dijaga orisinalitas dan tidak boleh dilalui oleh pengunjung.

Jadi intinya pertumbuhan ekonomi akibat banyaknya pengunjung disesuaikan dengan *sustainable* lingkungan dan harus *balance*

Tata kelola swasta dan pengelola Situ Gunung tidak terlepas dari perjanjian politik. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas dan kerja sama PNBP dan “Izin Pengusaha Pariwisata Alam” (IPPA) perjanjian ini mengatur izin usaha, jumlah lahan yang di bangun, investasi dan keuntungan (TNGGP, 2021). Dalam konteks ekowisata Situ Gunung, kata “pasar” dikaitkan dengan jumlah pengunjung yang datang ke Situ Gunung, dan hasil penjualan tiket masuk kawasan. Pada tahun 2019 pengunjung di Situ Gunung dalam setahun mencapai 309.000 kunjungan meningkat hampir 10 kali lipat dari tahun 2017 yakni 34.000 kunjungan dalam setahun. Jumlah kunjungan yang besar ini memberikan benefit tentunya bagi swasta dan Situ Gunung tapi juga masyarakat sekitarnya (TNGGP, 2021).

Dalam pengelolaan tersebut pihak swasta mampu memberikan modal kapital dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata, seperti akomodasi, jasa transportasi, jasa paket wisata dan lain sebagainya. Dengan tata kelola kerja sama antara TNGGP dan swasta sudah termasuk tata kelola yang kolaboratif. Namun, di sisi lain tata kelola perlu mengedepankan prinsip dalam ekowisata yakni partisipasi masyarakat. Di Situ Gunung sendiri, konsultasi dan pertemuan dengan masyarakat dalam mendiskusikan program yang akan dilakukan Situ gunung kedepannya belum berkelanjutan. Masyarakat jarang dilibatkan dalam pengelolaan. Hal ini terjadi karena perbedaan kepentingan dan *power*. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat belum bisa vokal dalam menyampaikan aspirasi mereka tentang ekowisata Situ Gunung.

Dalam sistem kerja sama dengan swasta dilakukan dengan sistem investasi, seperti pembangunan jembatan gantung dan fasilitas pendukung, seperti restoran, cafe, villa, dan *glamping*. Ekowisata Situ Gunung sangat berdampak secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Bentuk nyatanya adalah pendirian villa, travel, dan restoran di sekitar Situ Gunung. Perputaran ekonomi di masyarakat kawasan wisata Situ Gunung ketika *weekend* sebesar Rp. 92.000.000/hari sedangkan di hari biasa sebesar Rp.67.000.000/hari. Sedangkan dalam pendapatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pendapatan perusahaan sebesar Rp. 200.0000.000/hari di waktu *weekend*. Dana tersebut sebagian dialokasikan oleh swasta menjadi kios-kios pedagang dan fasilitas hiburan di Situ Gunung. Pembangunan fasilitas pendukung, seperti restoran, cafe, tribun, teater, jembatan gantung, dan *glamping*, sedikit banyaknya melakukan perubahan yang positif walaupun memiliki dampak negatif yang ditimbulkan bagi wisata, seperti berkurangnya lahan tutupan kawasan hutan pemanfaatan dan kebersihan di sekitar sungai dan air terjun. Pembangunan fasilitas ini kemudian dibuat oleh swasta menjadi spot yang *instagramable* atau tempat yang bagus untuk di post di media sosial seperti instagram, facebook, dan media sosial lain.

Proses ini terbukti dengan banyaknya spot-spot yang bagus membuat pengunjung kalangan artis, *vlogger*, dan konten kreator berbondong-bondong datang ke

Situ Gunung. Promosi media sosial di zaman sekarang sangat diperlukan sebagai bahan *branding*.

Tabel 7. Aspirasi Untuk Perbaikan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Situ Gunung Tahun 2023

Indikator	Kondisi Lapangan	Perbaikan Tata Kelola yang Diperlukan
Mengurangi presentase kemiskinan	Dalam kurun waktu 2015-2019 kemiskinan turun sebesar 0,3%	Diperlukan tata kelola yang yang menunjang penerapan <i>community based tourism</i> agar pengentasan kemiskinan lebih optimal
Pengembangan UMKM	UMKM masih belum optimal, pelaku UMKM memiliki pendapatan yang rendah	Diperlukan tata kelola yang kolaboratif antara pemerintah lokal, pengelola, swasta dan POKDARWIS dalam memfasilitasi prasarana UMKM dan upaya promosi secara digital
Infrastruktur yang baik	Sarana dan pransarana Situ Gunung menunjang peningkatan jumlah kunjungan sebanyak 300.000 pada tahun 2019	Tata kelola berprinsip ekosentrisme perlu beriringan sejalan untuk menjaga pembangunan tersebut tidak merusak ekosistem
Kerja sama stakeholder	Kemitraan TNGGP dan swasta meningkatkan perekonomian, namun kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat lokal masih kurang	Dalam kemitraan stakeholder harus mengedepankan musyawarah dan konsensus dalam pengambilan kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Kolaborasi harus bersinergis pada semua kelompok stakeholder
Kesadaran lingkungan	Pengelolaan sampah organik dan non organik belum dilakukan di TNGGP, unsur abiotik seperti kualitas air mulai tercemar oleh sampah pengunjung	Tata kelola harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau pada tata kelola. Baik itu pemanfaatan hasil komoditas pertanian lokal dan limbah sampah yang dijadikan hasil UMKM
Tata kelola yang baik	Tata Kelola masih bersifat <i>top Down</i> , kebijakan masih berfokus di stakeholder kunci	Tata kelola juga perlu mempertimbangkan kebutuhan di masyarakat dengan skema <i>bottom up</i> dan menerapkan <i>collaborative governance</i>

4.3 Tata Kelola Masyarakat

Tata kelola masyarakat harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam tata kelola masyarakat berkelanjutan, keterhubungan antara negara dan swasta harus saling terhubung dan berkolaborasi dengan masyarakat. Inovasi dan aspirasi dari masyarakat harus didukung oleh stakeholder lain agar keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan bisa terwujud. Bentuk tindakan kolektif yang terorganisir merupakan perubahan yang harus dilakukan seperti daur ulang sampah, pengembangan komunitas, organik, dan produksi pangan agro-ekologi, kemudian mengumpulkan negara atau swasta untuk mendukung upaya tersebut.

Dalam kasus ekowisata Situ Gunung inovasi masyarakat terealisasi hanya di desa Gedepanggrango dengan mengolah sampah menjadi pupuk organik. Limbah ini yang berasal dari sampah rumah tangga warga, inovasi tersebut digagas oleh pemerintah desa dengan warga lokal, Mengingat pertanian menjadi mata pencaharian utama Desa Gedepanggrango, maka pemanfaatan limbah perlu dilakukan. Sayangnya, inovasi tersebut kurang mendapatkan perhatian lebih dari pengelola dan pihak swasta dengan memanfaatkan limbah sampah makanan di kawasan menjadi pupuk, dan limbah plastik menjadi produk UMKM. Sedangkan manifestasi tata kelola seperti sosialisasi oleh pihak pemerintah lokal seperti desa dan kecamatan masih belum bisa menjembatani masyarakat lokal terhadap pihak pengelola TNGGP dan swasta. Jika dilihat dari keadaan tersebut, tata kelola yang partisipatif belum tercapai dan perlu diadakannya perbaikan, terutama

efektivitas tata kelola tersebut bisa bersifat *bottom up*, aturan-aturan ini bisa disesuaikan dengan konteks masyarakat desa.

Dalam hal UMKM, pihak pengelola swasta dan pemerintah lokal juga belum memfasilitasi dan mendukung. Diharapkan *supply* komoditas oleh-oleh bisa dikembangkan oleh masyarakat lokal tanpa harus mengambil dari luar desa. UMKM Desa Gedepanggrango masih terhambat dan kurang maksimal sehingga produk-produk andalan desa kalah saing dari barang/komoditas dari luar daerah.

Dalam pengembangan ekowisata diperlukan perbaikan tata kelola berdasarkan pencapaian yang akan diubah. Dalam penelitian ini, perbaikan tata kelola dikaitkan dengan 6 indikator SDGs pada ekowisata Situ Gunung.

Dalam tabel 7 dijelaskan bahwa pengembangan ekowisata di Situ Gunung masih terkendala oleh penerapan tata kelola yang masih berfokus pada stakeholder kunci seperti pengelola dan swasta. Dalam penerapannya, tata kelola ekowisata belum banyak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Tata kelola di Situ Gunung perlu menerapkan skema ekonomi hijau, *community based tourism*, dan *collaborative governace* sebagai skema dalam menjalankan pengelolaan, kontrol, dan perencanaan pembangunannya.

5. Kesimpulan

Terdapat prioritas yang berbeda dalam pencapaian SDGs di kawasan Situ Gunung antara lain: kerjasama stakeholder (0,503), infrastruktur yang baik (0,466), mengurangi kemiskinan (0,185),

pengembangan UMKM (0,166), dan peduli lingkungan (0,101). Prioritas dari mayoritas aktor, terutama masyarakat lokal yang lebih berfokus pada SDGs di bidang ekonomi. Kerjasama stakeholder memiliki prioritas yang tinggi, terutama kerjasama antara pengelola dan swasta. Keberhasilan kerjasama ini mampu meningkatkan jumlah kunjungan dan pendapatan warga sekitar ekowisata Situ Gunung. Namun, di sisi lain prioritas SDGs di bidang lingkungan, implementasi para aktor masih rendah disebabkan kurangnya sinergisitas pengelola, swasta, dan masyarakat.

Penerapan tata kelola dalam segala aspek pembangunan begitu penting termasuk pembangunan ekowisata. Pada ekowisata di Situ Gunung, penerapan tata Kelola, baik perencanaan, kontrol, dan *management*, masih bertumpu pada stakeholder kunci, yakni TNGGP dan swasta yang memiliki *power* dan modal yang kuat di Situ Gunung. Sedangkan pada stakeholder seperti pemerintah lokal, masyarakat, dan lembaga lokal semacam karang taruna dan POKDARWIS belum bisa mengakses banyak terhadap tata kelola yang ada. Dengan kondisi tersebut, perbaikan tata kelola di Situ Gunung perlu menerapkan beberapa prinsip-prinsip berkelanjutan, seperti ekonomi hijau, *collaborative governance*, dan *community based tourism*.

Penelitian ini bisa menjadi penelitian lanjutan dalam melihat aspek SDGs lain diluar 6 indikator yang telah diuji. Penggunaan metode AHP juga belum sepenuhnya menggambarkan keterikatan antar kriteria dan alternatif. Untuk melihat lebih jauh keterhubungan antar elemen bisa digunakan *Analytic Network Process* (ANP).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mughis Mudhofir. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik* dalam *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol. 18, No. 1, Januari 2013, Hal 75-100
- Ackermann, F., & Eden, C. (2011). *Strategic Management of Stakeholders: Theory and Practice*. June.
- Arnold, M. G. (2018). Sustainability value creation in frugal contexts to foster Sustainable Development Goals. *Business Strategy and Development*, 1(4), 265–275.
- Bagus, P., Suryoko, & Sri. (2018). Dampak Pengembangan Pariwisata Terhadap Perkembangan Umkm Pada Kawasan Wisata Dieng. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(4), 310–320.
- Bidarbakhtnia, A. (2020). Measuring Sustainable Development Goals (SDGs): An Inclusive Approach. *Global Policy*, 11(1), 56–67.
- BPS. (2018). *Jumlah Devisa Sektor Pariwisata (Miliar US\$)*. https://bps.go.id/indikator/indikator/view_data/0000/data/1160/sdgs_8/1
- Bryson, J. (2016). *What to Do When Stakeholders Matter*. *What To Do When Stakeholders Matter: A Guide to Stakeholder Identification and Analysis Techniques*. August.
- Bumiaji, D., & Wisata, K. (2021). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-)*. 7(1), 20–29.
- Cloutier, S., & Pfeiffer, D. (2015). Sustainability Through Happiness: A Framework for Sustainable Development. *Sustainable Development*, 23(5), 317–327.
- Elder, M., & Olsen, S. H. (2019). The Design of Environmental Priorities in the SDGs. *Global Policy*, 10(January), 70–82.
- Emerson, krik et.al. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Publik Administration research and Theory*. JPART 22: 1-29
- Forje, G. W., Tchamba, M. N., & Eno-Nku, M. (2021). Determinants of ecotourism development in and around protected areas: The case of Campo Ma'an National Park in Cameroon. *Scientific African*, 11, e00663.
- Hasanah, B. (2019). Tata Kelola Desa Wisata Sukaratu Berbasis Kerakyatan. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 7(2), 108–121.
- Higham, J. (2007). *Critical Issues in Ecotourism: Understanding a complex tourism phenomenon* (Elsevier (ed.); 1st ed.).
- Hutauruk, A., & Harto, S. (2017). Jom FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2017 Page 1. *Jom Fisip*, 4(1), 1–14.
- Jusman, A. K. (2016). *Jurnal Polinter Prodi Ilmu Politik FISIP UTA'45 Jakarta* Vol. 2 No. 1 (Maret-Agustus 2016). *Jurnal Polinter*, 2(1), 12–32.
- Koehler, G. (2016). Assessing the SDGs from the standpoint of eco-social policy: using the SDGs subversively. *Journal of International and Comparative Social Policy*, 32(2), 149–164.
- Kooijman, E. D., McQuaid, S., Rhodes, M. L., Collier, M. J., & Pilla, F. (2021). Innovating with nature: From nature-based solutions to nature-based enterprises. *Sustainability (Switzerland)*, 13(3),
- Kronenberg, K., & Fuchs, M. (2021). Aligning tourism's socio-economic impact with the United Nations' sustainable development goals. *Tourism Management Perspectives*, (September 2020), 100831.
- Kry, S., Sasaki, N., Datta, A., Abe, I., Ken, S., & Tsusaka, T. W. (2020). Assessment of the changing levels of livelihood assets in the Kampong Phluk community with implications for community-based ecotourism. *Tourism Management Perspectives*, 34(March), 100664.
- Li, H., Nijkamp, P., Xie, X., & Liu, J. (2020). *A New Livelihood Sustainability Index for Rural Revitalization Assessment-A Modelling Study on Smart Tourism Specialization in China*. 12, 148.
- Marsono. (2020). *Penggunaan Metode Analytical Hierarchy process (AHP) Dalam Penelitian*. IN Media.
- Mulyana, E., Ratnata, I. W., Saputra, W. S., & Ardiansyah, N. P. (2020). Penerapan Teknologi Tepat Guna pada Pengolahan Limbah Rumah Tangga di Desa Sukajaya Kabupaten Bandung Barat. *Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 7(1).
- Neuman, W. L. (2013). *Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7th ed.). PT Indeks.
- Ngoyo, M. F. (2015). Mengawal Sustainable Development Goals (SDGs); Meluruskan Orientasi Pembangunan yang Berkeadilan. *Sosioreligius*, 1(1), 77–88.
- Nurhayati, A., Aisah, I., & Supriatna, A. K. (2019). Model development of a synergistic sustainable marine ecotourism-A case study in Pangandaran Region, West Java Province, Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(12).
- Ojong, F. E., Eja, E. I., Undelikwo, V. A., & Agbor, E. A. (2013). *INDIGENOUS PEOPLES' PERCEPTION OF ECOTOURISM IN CROSS RIVER STATE, NIGERIA*. 4(1), 275–281.
- Risandewi, T. (2017). Analisis Infrastruktur Pariwisata

- dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata Candirejo Kabupaten Magelang. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 15(1), 103–118.
- Rout, P. R., Verma, A. K., Bhunia, P., Surampalli, R. Y., Zhang, T. C., Tyagi, R. D., Brar, S. K., & Goyal, M. K. (2020). Fundamentals and Framework Introduction to Sustainability and Sustainable Development. *Sustainability: Fundamentals and Application*, 3–19.
- Saaty, T. L. (1994). *How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process*. Interfaces.
- Sarwono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Graha Ilmu.
- Scoones, I. (2016). The Politics of Sustainability and Development. *Annual Review of Environment and Resources*, 41, 293–319.
- Shafieisabet, N., & Haratifard, S. (2020). The empowerment of local tourism stakeholders and their perceived environmental effects for participation in sustainable development of tourism. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45(October), 486–498.
- Sudarmo. 2009, Elemen-Elemen Collaboration Leadership dan Hambatan-Hambatan Bagi Pencapaian Efektifitas Collaboration Governance, *Jurnal Spirit Publik*. Vol.15, no.2, hlm: 117-132,ISSN 1907-0489
- Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukamantri, D., Barat, J., Sjaf, S., Hidayat, N. K., Barlan, Z. A., Elson, L., & F, H. F. (2021). *Measuring Achievement of Sustainable Development Goals in Rural Area: A Case Study of Sukamantri Village in Bogor District, West Java , Indonesia Mengukur Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Pedesaan: Studi Kasus*. 09(02).
- Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*, 78(November 2019),